

BAB II

Interaksi Kelompok Etnis Tionghoa dengan Etnis Non-Tionghoa Dalam Perguruan Tinggi Negeri: Studi Tentang Adaptasi Budaya oleh Mahasiswa Etnis Tionghoa

Kebudayaan adalah hal yang kompleks yang melingkupi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lainnya dan kebiasaan yang dihadapkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Wood, 2013:132). Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku bangsa dan budaya dimana terdapat 300 kelompok etnis dan 1.340 duku bangsa. Beragamnya kelompok etnis dan suku bangsa di Indonesia, terdapat nilai-nilai kebudayaan yang berbeda pada setiap etnis dan suku bangsa. Salah satunya adalah budaya Etnis Tionghoa.

Bab kedua dalam penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana proses interaksi dan adaptasi yang dilakukan oleh mahasiswa Etnis Tionghoa dengan mahasiswa etnis non-Tionghoa di Perguruan Tinggi Negeri.

1.1 Budaya

1.1.1 Budaya

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari beragam unsur yang kompleks, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni (Sulasman, 2013:20). Budaya merupakan suatu ilmu yang bisa dipelajari karena budaya merupakan suatu pola hidup yang sifatnya menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Beragamnya aspek budaya dapat menentukan perilaku komunikasi individu. Budaya juga menyediakan kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas individu serta

memungkinkan untuk meramal perilaku orang lain. Kebudayaan bisa mempengaruhi tingkat pengetahuan serta meliputi sistem ide atau gagasan yang ada dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak (Sulasman, 2013:21).

1.1.2 Pengertian Budaya Mayoritas

Mayoritas etnik mengarah pada suatu keadaan di mana kelompok etnis tertentu terdiri dari mayoritas populasi tertentu. Hal ini bisa dilihat pada silsilah yang mengacu pada ras Kaukasia, ras Asia, atau ras kulit hitam. Kita juga bisa mengacu pada kesamaan yang ada pada praktik budaya atau agama, praktik perilaku dan berbahasa (Liliweri, 2018:226). Mayoritas merupakan bagian yang lebih besar atau lebih dari setengah dari jumlah total.

Mayoritas bisa dibandingkan dengan pluralitas dimana ini merupakan subset yang lebih besar dibandingkan subset lainnya yang perlu untuk dipertimbangkan. Budaya mayoritas yang ada di suatu lingkungan atau kelompok dominan adalah kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Ini merupakan keadaan ketidakseimbangan yang bisa mendorong prasangka mayoritas kepada minoritas (Liliweri, 2018:228).

Konsep mayoritas sering dikaitkan dengan dominan culture dimana konsep ini bisa dipahami sebagai suatu aspek yang berhubungan dengan kehidupan individu terutama mengenai interaksi antarmanusia. Konsep mayoritas memiliki kaitan dengan “sharing” pada bidang kekuasaan di mana kekuasaan untuk “memerintah” dan “mengurus” masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep superioritas dan inferioritas, antara dominan dan submisif, antara in group dan outgroup. Menurut Williams (1964), terdapat beberapa karakteristik mayoritas, yaitu:

- a. Sekelompok individu yang bersikap bahwa merekalah yang superior dibandingkan kelompok etnik yang dijadikan inferior
- b. Mereka percaya bahwa kelompok minoritas secara ilmiah memiliki perbedaan sehingga harus disingkirkan
- c. Mereka percaya jika kaum mayoritas adalah adalah kaum yang paling memiliki hak sehingga mereka bisa mengklaim bahwa mereka yang paling berkuasa
- d. Mereka memiliki rasa takut dan selalu curiga bahwa kelompok minoritas selalu memiliki rencana untuk menggerogoti faktor yang menguntungkan kelompok dominan.

Beberapa karakteristik di atas merupakan salah satu faktor munculnya prasangka sosial antara mayoritas dan minoritas ataupun sebaliknya dimana prasangka sosial inilah yang merupakan studi klasik dari diskriminasi (Liliweri, 2018:229).

1.2 Etnis Tionghoa di Indonesia

1.2.1 Kedatangan Orang Tionghoa ke Nusantara

Kedatangan Etnis Tionghoa ke Hindia Belanda tak bisa terlepas dari jatuh bangun dinasti di China yang membuat gelombang imigrasi Orang Tionghoa ke Selatan, utamanya ke Asia Tenggara termasuk Indonesia (Kompas.com). Di masa kolonialisme, Orang Tionghoa terlibat pada beberapa masalah sosial dan politik, namun Orang Tionghoa lebih cenderung aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Migrasi yang dilakukan oleh Orang Tionghoa ke Nusantara terjadi dalam 3 fase, yaitu (1) pada masa kerajaan, (2) masa kedatangan Bangsa Eropa, dan (3) masa penjajahan Belanda di Nusantara (Aziz, 2021:35). Pada masa kerajaan, Orang Tionghoa sudah masuk ke Nusantara, namun tidak banyak yang datang. Datangnya orang Tionghoa ke Nusantara belum dianggap mampu untuk membentuk suatu

komunitas yang stabil pada waktu itu. Orang Tionghoa sebagai imigran ini melakukan pekerjaan sebagai pelayar atau pedagang dimana komunitas pelayar dan pedagang akan melakukan transaksi di pelabuhan utama di kawasan Nusantara yang mengharuskan mereka untuk melakukan interaksi dengan penduduk lokal, syahbandar, dan sesama pedagang asing yang ada di Pelabuhan.

Orang Tionghoa mulai pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari uang dimana perpindahan yang dilakukan dilakukan dari desa ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Walaupun Orang Tionghoa sering berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, namun adat serta akar budaya Orang Tionghoa tetap tertanam dengan baik. Orang Tionghoa mulai melakukan perpindahan atau migrasi di abad ke-12 dan abad ke-13.

Menurut Aziz (2021:38), kedatangan Orang Tionghoa pada tahapan kedua yaitu terjadi ketika datangnya orang Eropa di kawasan Nusantara. Fase ini berlangsung di abad ke-16 dimana Orang Eropa datang ke Asia Tenggara, yaitu Bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Hal ini membuat Pelabuhan menjadi semakin ramai sehingga terdapat banyak peluang perdagangan. Sedangkan di tahap ketiga, kedatangan Orang Tionghoa bertepatan dengan kekuasaan Nusantara di bawah kendali pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini, ditemukan banyak tempat tinggal Orang Tionghoa di Kalimantan Barat, Pantai Timur Sumatera, sepanjang pesisir Utara Jawa, dan beberapa kawasan lainnya. Di sinilah pemerintah Hindia Belanda mendatangkan Orang Tionghoa sebagai pekerja untuk proyek perkebunan serta pertambangan

Menurut Suryadinata, Orang Tionghoa sudah ada di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-11 dan hingga abad ke-18, masih banyak Orang Tionghoa yang berdatangan ke kawasan Nusantara. Sebelum tahun 1729, penduduk Tionghoa di

Batavia, atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta mempunyai sekolah swasta yang diselenggarakan di rumah orang kaya dan pejabat atau guru private yang datang ke rumah Orang Tionghoa untuk mengajar. Di tahun inilah terdapat perubahan dalam sistem pendidikan untuk Orang Tionghoa dimana salah satu tokoh VOC memberikan arahan untuk menabuh bangunan di area rumah sakit yang akan digunakan untuk bangunan sekolah bagi Orang Tionghoa dimana satu jumlah muridnya sekitar 30-40 orang (Suryadinata, 2010:8).

1.2.2 Tionghoa Dalam Tragedi: Politik Kolonial Hingga Orde Baru

Kedudukan Orang Tionghoa pada sejarah Nusantara mengalami dinamika dalam kebijakan politik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC, Pemerintah Hindia Belanda, serta diskriminasi di masa Orde Baru memberikan trauma yang mendalam bagi Orang Tionghoa. Diskriminasi yang muncul dari kebijakan politik membuat Orang Tionghoa di Nusantara tidak bisa beribadah dengan tenang serta tidak diizinkan untuk mengekspresikan simbol budaya serta warna tradisinya dimana hal ini dimuat dalam PP No 14/1967 (Azis, 2021:117). Orang Tionghoa sering dijadikan sebagai kambing hitam atau korban politik sehingga pada konteks sejarah Indonesia di tahun 1998 menjadi pengalaman gelap yang memakan banyak korban dari Orang Tionghoa.

Di awal orde baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi yang ditujukan kepada Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Soeharto bersemangat untuk melihat kepemimpinan politiknya berdampak signifikan pada bidang militer, politik, serta sosial-budaya dimana rezim pemerintahannya mengusahan secara cepat untuk menciptakan bangsa yang homogen dimana dalam hal ini, bangsa yang homogen merujuk pada kekuatan penduduk pribumi (Aziz, 2021:138). Orang Tionghoa di Indonesia harus meninggalkan identitas mereka sebagai Tionghoa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Soeharto menetapkan beberapa kebijakan dimana di tahun 1966,

Soeharto mewajibkan nama Orang Tionghoa diubah menjadi nama khas Indonesia atau nama Jawa. Selain itu, sekolah berbahasa Tionghoa ditutup oleh pemerintah. Di tahun 1967, terdapat larangan bagi Orang Tionghoa untuk merayakan hari raya Imlek dan melakukan tradisi lainnya. Orang Tionghoa penganut agama Buddha dan Konghucu mengalami kesulitan karena ada benturan terhadap sila 1 pada Pancasila sehingga kemudian mereka beradaptasi untuk mendapatkan pengakuan dari Negara Indonesia (Suryadinata, 2010:77-78).

Di tahun 1978, pemerintah orde Baru membuat jarak dengan agama Konghucu dimana Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang berisikan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengakui 5 agama, dimana Agama Konghucu tidak termasuk di dalamnya. Adanya jarak yang dibuat dengan Agama Konghucu memberikan pengaruh pada infrastruktur tempat ibadah dimana Rezim Soeharto berushaa mengubah klenteng menjadi vihara.

1.2.3 Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa

Awal mula terdapat diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia adalah karena masalah politik. Orang Tionghoa yang saat itu merupakan minoritas menjadi tumbal kekuasaan. Di tahun 1963, Soekarno melakukan pidato di hadapan Kongres Baperki pada bulan Maret 1963 dan menyatakan bahwa Etnis Tionghoa merupakan salah satu suku di Indonesia (Aziz, 2021:119). Soekarno mengilustrasikan bahwa Etnis Tionghoa adalah salah satu kaki dari tubuh Indonesia. Pemerintah Soeharto mengambil kebijakan kepada Etnis Tionghoa di Indonesia dalam bentuk asimilasi. Dimana Soeharto menyatakan Orang Tionghoa harus segera berintegrasi serta berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli. Namun faktanya, hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dimana Prof. Leo Suryadinata melihat bahwa seringkali kebijakan asimilasi terjadi paradoks dimana toleransi terhadap agama minoritas serta perbedaan

antara pribumi dan non-pribumi justru memisahkan, dan bukan menyatukan antar etnis yang ada di Indonesia (Suryadinata, 2003:2).

Suryadinata juga menganggap bahwa kebijakan asimilasi hanyalah politik utama Orde Baru untuk merespons Orang Tionghoa di Indonesia. Soeharto merusak tiga pilar utama kebudayaan Orang Tionghoa antara lain sekolah menengah Tionghoa, pers berbahasa Tionghoa, dan organisasi etnis. Ketika pilar utama ini diruntuhkan, secara perlahan Orang Tionghoa dipaksa untuk menghilangkan kebudayaannya serta menghapus tradisinya. Kebijakan Soeharto di satu sisi dimaksudkan untuk mendekatkan orang Tionghoa ke dalam kebudayaan Indonesia, namun kebijakan ini justru mengandung kekerasan budaya karena terdapat unsur paksaan dengan menggunakan kekuasaan sehingga bukan asimilasi secara alami dengan kesadaran kebudayaan sehingga menyebabkan trauma psikologis bagi Orang Tionghoa di Indonesia. Tak hanya itu, namun juga adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Orang Tionghoa.

Orang Tionghoa di Indonesia dianggap sudah merana karena selalu dikalahkan oleh kekuasaan di berbagai bidang kehidupan. Orang Tionghoa tidak mendapatkan kesempatan di bidang politik, militer, kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan sehingga mereka hanya bisa bergelut di bidang ekonomi. Di sinilah banyak Orang Tionghoa yang menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk mencari peruntungan yang banyak demi kehidupan yang layak. Namun karena akumulasi kapital, Orang Tionghoa justru dianggap sebagai sosok yang hanya memeras ekonomi rakyat dan menjadi kambing hitam dalam segala permasalahan sosial-ekonomi di negeri ini.

Pemerintah Soeharto yang terkenal otoriter tidak memberikan kesempatan bagi Orang Tionghoa untuk mengekspresikan identitasnya dimana Orang Tionghoa hanya diizinkan untuk bersekolah di sekolah nasional dengan sistem pendidikan yang menggunakan Bahasa Indonesia. Kebijakan asimilasi yang memaksa membuat Orang Tionghoa semakin membuat jarak yang jauh dengan penduduk asli di negeri ini. Kebijakan untuk mengganti nama dianggap sebagai identifikasi asimilasi sehingga membuat Orang Tionghoa mengubah nama mereka menjadi nama Jawa yang terdengar asing untuk mereka. Leo Suryadinata menganggap bahwa kebijakan asimilasi dengan mengganti nama adalah bentuk kekerasan kekuasaan.

1.3 Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya bisa terjadi apabila pengirim pesan merupakan anggota dari suatu budaya dan penerima pesan merupakan anggota budaya lainnya (Mulyana, 2014:20). Budaya memberikan pengaruh kepada orang-orang yang sedang melakukan interaksi. Komunikasi dan budaya merupakan kedua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Liliweri, 2007:8). Proses perhatian komunikasi serta kebudayaan ada pada variasi langkah serta cara berkomunikasi yang melintasi komunitas atau kelompok manusia. Fokus perhatian studi komunikasi serta kebudayaan juga melingkupi bagaimana memahami makna, pola tindakan, serta bagaimana makna dan pola bisa diartikulasikan ke suatu kelompok sosial, kelompok budaya, kelompok politik, proses pendidikan, serta lingkungan teknologi yang mengharuskan adanya interaksi antarmanusia.

Menurut Samovar (1976:25), komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi antara individu-individu yang memiliki budaya yang berbeda, seperti antar-suku, bangsa, antaretnik, antar ras, atau bahkan antar kelas sosial. Secara alamiah, proses komunikasi antarbudaya berakar dari relasi sosial antarbudaya yang menghendaki adanya interaksi

sosial. Relasi antarmanusia menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana isi dan makna pada sebuah pesan diinterpretasikan.

Komunikasi antarbudaya yang interaktif merupakan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam dua arah atau timbal balik, namun masih berada pada tahap yang rendah. Jika ada proses pertukaran pesan, itu akan memasuki tahap yang tinggi seperti saling mengerti, memahami perasaan dan tindakan bersama sehingga komunikasi sudah masuk ke tahap transaksional (Liliweri, 2007:24).

1.4 Prasangka

1.4.1 Pengertian prasangka

Menurut Samovar (2010:370), prasangka merupakan perasaan afektif kepada individu anggota kelompok yang hanya didasarkan keanggotaan kelompok mereka. Prasangka bisa merujuk pada keyakinan yang sifatnya tidak berdasar dan mungkin termasuk tiap sikap yang tidak masuk akal yang tidak bisa diandalkan terhadap terhadap pengaruh yang rasional. Allport menjelaskan bahwa prasangka merupakan antipati yang didasarkan pada generalisasi yang salah atau tidak luwes. Prasangka yang buruk kepada etnis lain merupakan sikap antipati yang dilandasi oleh kesalahan atau generalisasi yang tidak fleksibel hanya karena perasaan tertentu dan pengalaman yang salah. Prasangka mengandung sikap, pikiran, keyakinan, serta kepercayaan.

Meskipun prasangka antaretnis berakar dari generalisasi yang salah pada perasaan, namun prasangka berasal dari sebab tertentu. Menurut Samovar (2010:373), prasangka disebabkan oleh: (1) gambaran perbedaan antara kelompok, (2) nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas, (3) stereotipe antaretnik, dan (4) kelompok etnik atau ras merasa superior yang membuat etnis lain menjadi inferior. Zastrow (dalam Samovar, 2010:373) menjelaskan bahwa

prasangka berawal dari: (1) usaha untuk mempertahankan ciri kelompok etnis yang dilakukan secara berlebihan, (2) frustrasi, agresi, kecewa yang mengarah pada sikap menentang, (3) berhadapan dengan ketidaksamaan dan kerendahdirian, (4) kesewenang-wenangan, (5) alasan historis, (6) persaingan yang dilakukan secara tidak baik dan mengarah pada eksploitasi, (7) cara sosialisasi yang dilakukan secara berlebihan, (8) memandang kelompok lain dengan pandangan yang kurang menyenangkan atau sinis.

1.4.2 Fungsi Prasangka

Prasangka memiliki berbagai fungsi bagi individu yang memilikinya. Beberapa orang merasa bahwa prasangka memberikan penghargaan seperti rasa superioritas.

a. Fungsi pertahanan ego

Fungsi ini memberikan kemungkinan bagi individu untuk mempunyai prasangka tanpa harus mengakui bahwa mereka mempunyai suatu kepercayaan tentang kelompok luar.

b. Fungsi utilitarian

Fungsi ini memberikan kemungkinan individu untuk berpikir bahwa mereka memiliki penghargaan dengan mempertahankan prasangka yang mereka punya.

c. Fungsi menyatakan nilai

Dengan fungsi ini, individu bisa mengelompokkan, mengatur, serta membentuk persepsi mereka terhadap orang lain dengan cara yang masuk akal untuk mereka. bahkan jika hal tersebut tidak akurat. Pada hal ini, dunia akan terasa mudah untuk dihadapi karena individu melihat seseorang secara tidak personal, melainkan sebagai bagian dari suatu kelompok. Fungsi pengetahuan inilah yang memberikan banyak label.

Prasangka bisa dinyatakan dengan beragam cara, bisa dilakukan secara halus dan tidak langsung, namun kadang dilakukan secara terang-terangan dan langsung. Prasangka dinyatakan melalui apa yang disebut antilokusi dimana ini adalah istilah negatif atau stereotipe tentang anggota dari kelompok target. Individu yang memiliki prasangka ketika menghindari interaksi akan menarik diri untuk berhubungan dengan kelompok yang tidak disukainya. Prasangka menghasilkan diskriminasi, individu yang

menjadi target prasangka akan berusaha untuk keluar dari kelompoknya ketika pekerjaan, tempat tinggal, hal politik, kesempatan pendidikan dan rekreasi, gereja, rumah sakit, atau institusi sosial lainnya dipermasalahkan.

1.4.3 Prasangka terhadap Etnis Tionghoa dan Etnis mayoritas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susetyo (2010:146-147), hasil analisa faktor prasangka etnis Tionghoa menurut subjek etnis mayoritas adalah memiliki sikap egois, kurang bersosialisasi, kurang peduli, memiliki gaya hidup yang mewah, pelit, disiplin, pandai, percaya diri, ulet dalam bekerja, ambisius, mempunyaibakat berdagang, dan eksklusif. Sedangkan prasangka etnis mayoritas menurut subjek mahasiswa Etnis Tionghoa yaitu memiliki sifat suka gotong royong, lemah lembut, mudah menerima, ramah, sopan, setia kawan, memiliki sikap kurang baik kepada Etnis Tionghoa, iri hati, kasar, kurang berhati-hati, mempunyai motivasi yang rendah, mudah putus asa, dan memiliki tempramen yang buruk.

1.5 Perguruan Tinggi di Indonesia

1.5.1 Penjelasan mengenai perguruan tinggi

Perkembangan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan. Lewat laman pddikti.kemendikbud.go.id, tercatat ada 4.593 perguruan tinggi yang ada di Indonesia saat ini dimana terdapat penurunan sebesar 0,01 persen dari tahun sebelumnya karena adanya proses pemuktahiran data serta peningkatan kualitas perguruan tinggi dengan tujuan untuk mengembangkann SDM yang berkualitas, mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, serta siap menghadapi tantang di dunia industri.

Perguruan tinggi yang ada di Indonesia tersebar secara luas di berbagai provinsi dimana setiap provinsi mempunyai jumlah luas serta tingkat kepadatan penduduk yang berbeda. Jumlah penduduk Indomesiasebesar 270.20 juta jiwa serta perguruan tinggi sejumlah 4.593 yang terdiri dari 122 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 3.044 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 187 Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga lain (PTK/L), dan 1.240 Perguruan Tinggi Agama (PTA). Jumlah mahasiswa serta jumlah perguruan tinggi di setiap universitas beragam di setiap provinsi. Secara nasional, Jawa Barat dan

Jawa Timur adalah dua provinsi dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak secara berurutan. Jawa Barat mempunyai jumlah penduduk 49.94 juta jiwa dan menempati urutan pertama dengan 587 perguruan tinggi. Sedangkan Jawa Tengah yang mempunyai jumlah penduduk 39.4 juta jiwa mempunyai 558 perguruan tinggi.

